

## **BAB II**

### **DESKRIPSI LOKASI DAN SUBJEK PENELITIAN**

Pada bab II ini penulis memaparkan deskripsi lokasi dan subjek penelitian. Penulis mengambil Pemerintah Provinsi Bali (khususnya terkait dengan fasilitas pendidikan yang terkait kebijakan Sekolah Tatap Muka) sebagai deskripsi lokasi dan subjek penelitian, dimana diwakili oleh tiga narasumber yaitu Kepala Seksi Pengendalian Operasi UPTD, Pengendalian Bencana Daerah BPBD Provinsi Bali, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi Informatika Statistik Kota Denpasar, dan Kepala Bidang Publikasi dan Dokumentasi / Humas. Selain itu, peneliti memfokuskan pada pemberitaan hoaks mengenai klaster baru pada sekolah tatap muka, khususnya di Bali. Pendeskripsian subjek dan objek penelitian ini diambil dari hasil wawancara dan pengambilan data melalui website, ataupun beberapa artikel portal berita online lainnya. Berikut deskripsi mengenai subjek dan objek dari penelitian ini.

#### **A. Pemerintah Provinsi Bali**

Bali atau yang dikenal dengan sebutan Pulau Dewata, terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok, tepatnya terletak antara  $8^{\circ}3'38''$  –  $8^{\circ}50'56''$  Lintang Selatan dan  $114^{\circ}25'53''$  –  $115^{\circ}42'39''$  Bujur Timur. Pada tahun 1958 lalu, Bali resmi menjadi provinsi sendiri, setelah sebelumnya menjadi bagian dari Provinsi Sunda Kecil bersama dengan Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores dan Timor. Provinsi Bali menjadi daerah pariwisata terdepan di Indonesia.

Perpaduan alam yang indah dengan budaya yang menarik dan khas menjadi magnet jutaan wisatawan asing dan domestik untuk berkunjung ke pulau Bali (Purwanto, 2020).

Kemudian, di Provinsi Bali, mayoritasnya memeluk agama Hindu, sehingga hampir setiap sudut wilayah terdapat pura peribadatan yang dapat digunakan untuk ritual keagamaan. Provinsi Bali tidak hanya memiliki pemandangan yang indah, namun dikenal pula dengan kebudayaan yang unik, eksotik, dan terjaga. Masyarakat Bali menganut hidup Tri Hita Karana yang memuat tiga unsur pembangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya. Selain itu, Tri Hita Karana menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia (Tata Ruang, 2022).

Pemerintah Provinsi Bali memiliki Pemerintah Provinsi yang tentunya memiliki visi dan misi yang dipaparkan sebagai berikut:

1. Visi

Pemerintah Provinsi Bali memiliki visi yaitu, “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*”, atau melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru. Visi tersebut artinya menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia, sakalaniskala menuju kehidupan Krama dan Gurni Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui

pembangunan secara terpolo, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945.

## 2. Misi

Pemerintah Provinsi Bali memiliki beberapa misi yang menekankan pada hal-hal penting, seperti pemastian terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam jumlah dan kualitas yang memadai bagi kehidupan Krama Bali sehingga terwujudnya kemandirian pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani. Kemudian, melakukan pengembangan pada pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas serta didukung dengan pengembangan sistem dan data base riwayat kesehatan Krama Bali berbasis kecamatan, sekaligus pelayanan pendidikan yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas serta melaksanakan wajib belajar 12 tahun, sekaligus pengembangan sistem pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbasis keagamaan Hindu dalam bentuk Pasraman di Desa Pakraman/Desa Adat. Selanjutnya, misi dari Pemerintah Provinsi Bali melakukan pengembangan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi yaitu berkualitas dan berintegritas: bermutu, profesional dan bermoral serta memiliki jati diri yang kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Krama Bali. Selain itu, masih berhubungan dengan sumber daya manusia adalah menghasilkan

tenaga kerja yang kompeten, produktif, berkualitas dan memiliki daya saing tinggi serta memperluas akses kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri. Pemerintah Provinsi Bali juga mengembangkan sistem jaminan sosial secara komprehensif dan terintegrasi bagi kehidupan Krama Bali sejak mulai kelahiran, tumbuh dan berkembang sampai akhir masa kehidupannya, sekaligus untuk perlindungan tenaga kerja yang komprehensif, mudah dijangkau, bermutu, dan terintegrasi bagi Krama Bali yang bekerja di dalam dan di luar negeri. Kemudian, berhubungan dengan kebudayaan, Pemerintah Provinsi Bali memajukan kebudayaan Bali melalui peningkatan perlindungan, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni, dan budaya Krama Bali, sekaligus mengembangkan tata kehidupan Krama Bali secara sakala dan niskala berdasarkan nilai-nilai filsafat Sad Kertih yaitu Atma Kertih, Danu Kertih, Wana Kertih, Segara Kertih, Jana Kertih, dan Jagat Kertih.

Berkaitan dengan promosi pariwisata, Pemerintah Provinsi Bali melakukan pengembangan terhadap destinasi dan produk pariwisata baru berbasis budaya dan berpihak kepada rakyat yang terintegrasi antar kabupaten/kota se-Bali, sekaligus meningkatkan promosi pariwisata Bali di dalam dan di luar negeri secara bersinergi antar kabupaten/kota se-Bali dengan mengembangkan inovasi dan kreatifitas baru. Selain itu, meningkatkan standar kualitas pelayanan kepariwisataan secara komprehensif.

Pemerintah Provinsi Bali juga memiliki misi memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi Desa Pakraman/ Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan krama Bali yang meliputi Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan, sekaligus membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi kabupaten/kota di Bali dengan memberdayakan sumber daya lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam arti luas, serta mengembangkan industri kecil dan menengah berbasis budaya (branding Bali) untuk memperkuat perekonomian Krama Bali.

Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Bali meningkatkan pembangunan infrastruktur (darat, laut dan udara) secara terintegrasi serta konektivitas antar wilayah untuk mendukung pembangunan perekonomian serta akses dan mutu pelayanan publik di Bali, mengembangkan sistem keamanan terpadu yang ditopang dengan sumber daya manusia serta sarana prasarana yang memadai untuk menjaga keamanan daerah dan Krama Bali serta keamanan para wisatawan, mewujudkan kehidupan Krama Bali yang demokratis dan berkeadilan dengan memperkuat budaya hukum, budaya politik dan kesetaraan gender dengan memperhatikan nilai-nilai budaya Bali, mengembangkan tata kehidupan Krama Bali, menata wilayah, dan lingkungan yang, hijau, indah, dan bersih, serta melakukan pengembangan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah.

Pemerintah Provinsi Bali memang menjadi provinsi dengan kebudayaan yang unik, sekaligus destinasi pariwisata menarik, bahkan menjadi penyumbang devisa negara terbesar. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Bali terus berusaha untuk mengembangkan keunggulan tersebut melalui pengimplementasian visi dan misi. Pada penelitian ini, peneliti fokus pada Provinsi Bali, walau sumber data ada dari Kotamadya Denpasar.

### **B. Struktur dan Fungsi Pemerintah Provinsi Bali**

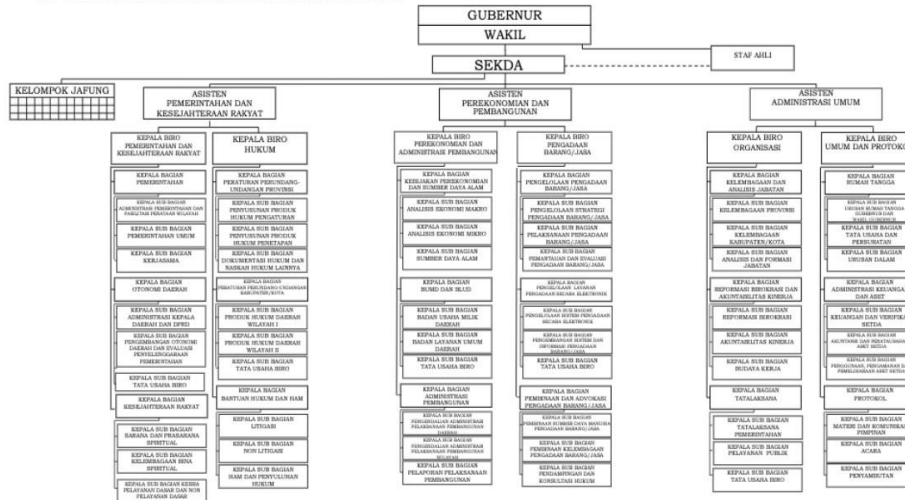
Pada bagian ini, penulis akan memaparkan dua bagian struktur Pemerintah Provinsi Bali. Bagian struktur pertama (Gambar 2.1), penulis memberikan struktur organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali pada Sekretariat Daerah. Dengan adanya struktur tersebut, maka penulis dapat mengetahui bahwa narasumber dalam penelitian ini memang berhubungan dengan topik penelitian ini, dan mengetahui strategi komunikasi krisis Pemerintah Provinsi Bali dalam menghadapi hoaks kemunculan klaster baru pada sekolah tatap muka. Struktur yang dipaparkan penulis akan fokus pada Badan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang melaksanakan fungsi pemerintahan bidang Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Komunikasi Informatika Statistik yang akan lebih dijelaskan pada struktur yang kedua.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali

LAMPIRAN I  
PERATURAN GUBERNUR BALI  
NOMOR 58 TAHUN 2019  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

A. STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH



Sumber: Website Pemerintah Provinsi Bali

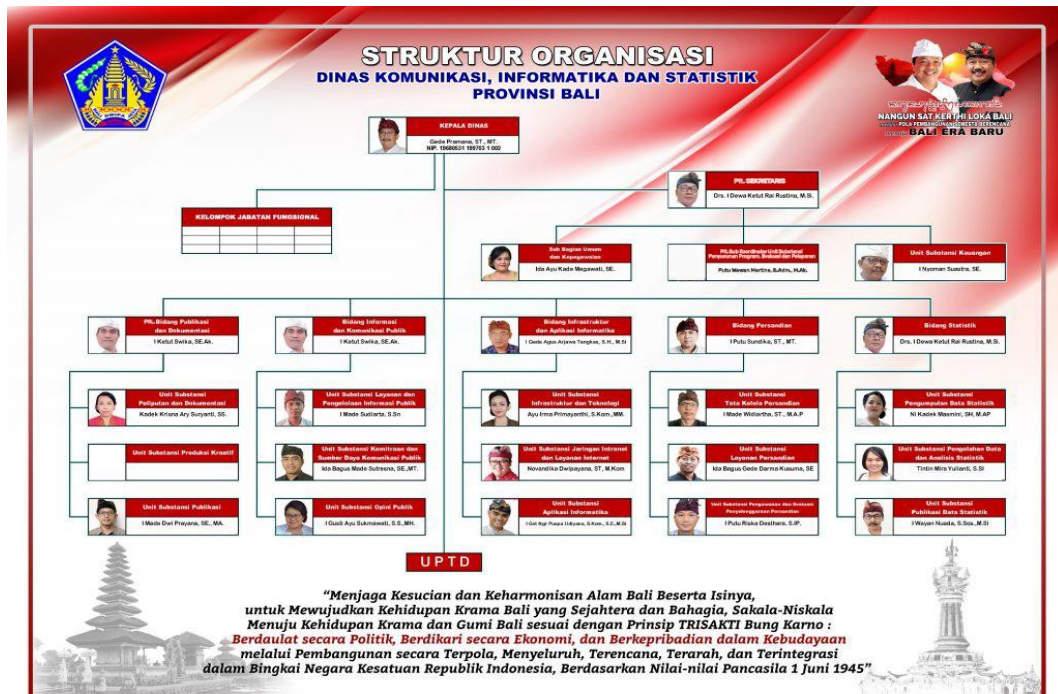
Struktur selanjutnya berkaitan dengan narasumber yang bergerak pada bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik (Gambar 2.1). Dinas inilah yang memang menangani segala bentuk informasi yang tersebar di provinsi Bali dengan tugas pokok yang berdasar pada Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 58 Tahun 2019 yaitu melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi hingga terbentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas

pembantuan sesuai bidang tugasnya. Kemudian, berikut fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika:

1. Merumuskan kebijakan teknis dibidang Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian yang menjadi kewenangan Provinsi;
2. Melaksanakan kebijakan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian yang menjadi kewenangan Provinsi;
3. Menyelenggarakan administrasi Dinas bidang Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian yang menjadi kewenangan Provinsi;
4. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas;
5. Menyelenggarakan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali



Sumber: Website Pemerintah Provinsi Bali

### C. Profil Narasumber

Penelitian ini memiliki 3 narasumber, dengan masing-masing profil sebagai berikut:

#### 1. Adhi Tiana Putra

Adhi Tiana Putra saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Pengendalian Operasi UPTD, Pengendalian Bencana Daerah BPBD Provinsi Bali. Beliau lahir di Denpasar, 3 September 1979. Tahun 2022 ini, kurang lebih sudah menjadi tahun ke-5 Adhia Tiana Putra menjalani jabatan tersebut. Sebagai seseorang

yang menjabat ditingkat BPBD, beliau bertugas untuk melaksanakan fungsi pemerintahan bidang Penanggulangan Bencana Daerah.

**2. I Gde Wirakusuma Wahyudi S.Sos,**

I Gde Wirakusuma Wahyudi S.Sos adalah Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi Informatika Statistik Kota Denpasar. Jabatan tersebut beliau mulai sejak 2019, sehingga kurang lebih telah menjabat selama tiga tahun. Beliau lahir di Singaraja, 5 Februari 1974 dengan memulai karir diawali sebagai wartawan HU Nusa Bali.

**3. Drs. I Gusti Ngurah Wiryanata, M.Si.**

Drs. I Gusti Ngurah Wiryanata, M.Si. menjabat sebagai Kepala Bidang Publikasi dan Dokumentasi atau Humas. Beliau sudah menjabat selama 20 tahun lebih.

**D. Pemberitaan Hoaks di Bali mengenai Hoaks Kemunculan Klaster Baru pada Sekolah Tatap Muka**

Selama pandemi COVID-19, pemberitaan tentang hoaks pun bermunculan. Berdasarkan hasil penelitian dari data statistik Kementerian Komunikasi dan Informatika, di awal tahun ini, sekitar bulan Januari hingga Maret. Terdapat rata-rata 1.500 berita hoaks di Indonesia. Di Provinsi Bali, pemberitaan hoaks pun tidak dapat dihindari, bahkan mengganggu secara finansial hingga psikososial, serta mengancam isu kesehatan dan kebencanaan.

Berikut data temuan isu hoaks pada website Radio Republik Indonesia yang bersumber dari Kominfo (Gambar 2.3)

Gambar 2.3 Temuan Isu Hoaks

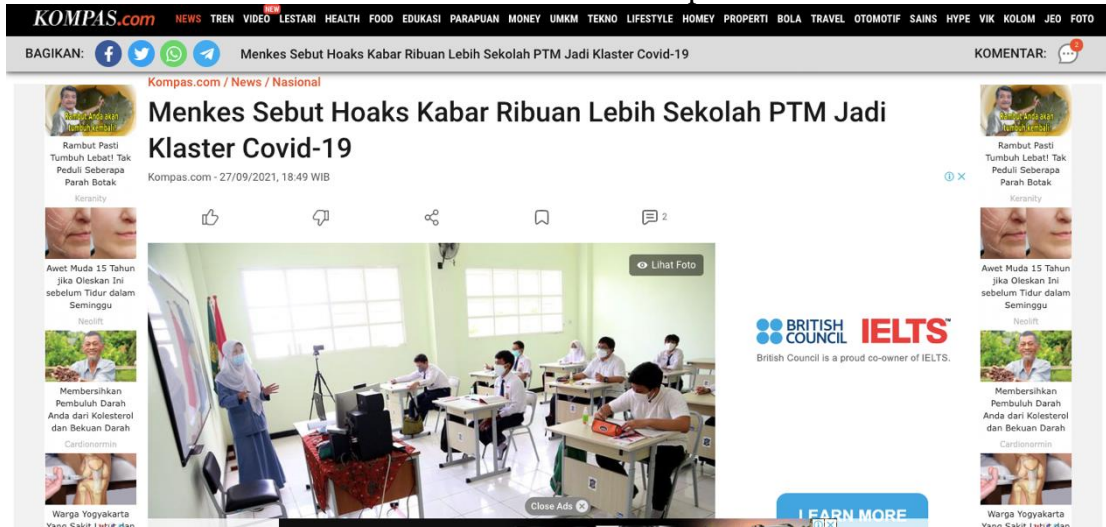


Sumber: Website Radio Republik Indonesia

Berdasarkan data pada Gambar 2.3 tersebut temuan isu hoaks pada periode Agustus 2018 – 31 Maret 2023 sebanyak 11.357.

Sebagai daerah pariwisata, provinsi Bali memang sangat rentan terhadap isu keamanan, kesehatan dan kebencanaan yang akhirnya memiliki keterkaitan dengan berita hoaks. Pemerintah Provinsi Bali menyebut situasi tersebut sebagai infodemi, munculnya pemberitaan hoaks yang memang mengganggu secara finansial, psikososial, persatuan dan keamanan. Berikut beberapa pemberitaan yang mengandung unsur mengenai hoaks kemunculan klaster baru akibat pemberlakuan kembali sekolah tatap muka (Gambar 2.4).

Gambar 2.4 Judul Berita mengenai Hoaks Kemunculan Klaster Baru Akibat Pemberlakuan Sekolah Tatap Muka



Sumber: Portal Berita Kompas.com



Sumber: Kominfo

Home > Nasional > Hoax! Klaster Covid-19 Saat Pemberlakuan PTM

ADVERTISEMENT

**Hoax! Klaster Covid-19 Saat Pemberlakuan PTM**

By Admin Bogor Daily 28 September 2021

Share



لدينا خطة النسخ الاحتياطية.

تمساعد استضافة الويب الموثوقة والسريعة من GoDaddy إدارة بيئانترنتك.

Trending

Nasional  
AKBP Achiruddin Hasibuan Akpol Tahun Berapa? Ini Profil dan Sepak Terjangnya

Hiburan  
Baca Komik One Piece 1083 di Komikcast, Cek!

Viral  
Video Viral Wanita Bercadar di Kebun Teh Ciwiday Bikin Geger!

Nasional  
AKBP Buddy Towoliu Akpol Tahun Berapa? Ini Profil dan Jejak Karirnya

Kabupaten Bogor  
Sungai Ciapus Meluap, Ciomas Banjir Bandang

Sumber: *Bogordaily.net*

Ribuan Sekolah Dikabarkan Jadi Klaster Covid-19  
**Menkes: Hoaks, Nggak Benar!**

Reporter & Editor:  
ACHMAD ALI FUTHUHIN

Nasional

Selasa, 28 September 2021 07:20 WIB



TERPOPULER

- Melesat 132 Persen, Bank Mandiri Targetkan Kartu Kredit Tumbuh 35-40...
- Erick Makin Wangi
- Mall Ciputra Jakarta Kembali Gelar Festival Kuliner Pecinan

SAMSUNG

Makinal C Ramadani

Galaxy S23 Ultra (Online Exclusive)  
Rp 21.999.000  
SHOP NOW

Galaxy S23  
Rp 13.999.000  
SHOP NOW

Bakmi Merdeka

R.M

SAHABAT BERUSAHA BERSAMA-SAMA  
UNTUK INDONESIA  
PULIH DAN BANGKIT

Sumber: *CNBC Indonesia*

Adanya pemberitaan hoaks di Bali memang terus meningkat, namun Pemerintah Provinsi Bali menegaskan bahwa sebenarnya tidak terdapat data yang menyatakan bahwa adanya kemunculan klaster baru pada sekolah tatap muka, yang berimbas pada penutupan sekolah. Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Provinsi Bali terus melakukan verifikasi data secara berkala, dimana setiap jam 3 sudah dikumpulkan untuk diambil oleh pihak Dinas



Pendidikan. Pemberitaan hoaks yang berhubungan dengan bidang pendidikan di Bali memang belum ditemui, karena mengedepankan pengecekan secara berkala dan koordinasi dari Pemerintah Provinsi Bali bersama Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda dan Olahraga.

Selain upaya tersebut, Pemerintah Bali selalu mengedepankan penyampaian informasi mengenai protokol kesehatan COVID-19, yang digunakan pula sebagai tolak ukur dan pedoman. Pemerintah Bali pun sangat terbuka, serta memanfaatkan berbagai jenis saluran informasi untuk menghindari adanya penyebaran hoaks, termasuk penyediaan website khusus untuk mengkonfirmasi pemberitaan hoaks yang berbeda. Hingga kini, dengan adanya hoaks yang bermunculan, Pemerintah Bali terus mengupayakan memberikan literasi digital, hingga sosialisasi untuk membuat masyarakat lebih bijak, serta dapat memilah-memilih pemberitaan yang benar, yang beredar ditengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan masing-masing sub bab bagian bab II tersebut, penulis telah memaparkan data-data yang didapatkan melalui hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi sehingga penulis dapat mengetahui bahwa Pemerintah Provinsi Bali memang sebagai provinsi yang dikenal sebagai destinasi pariwisata favorit, bahkan dapat menjadi penyumbang devisa negara terbesar. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Bali terus berinovasi dan mengimplementasikan visi dan misi yang telah dibangun, khususnya melalui fungsi struktur Pemerintah Provinsi Bali yang telah terbentuk. Namun, situasi

pandemi COVID-19 menjadi permasalahan baru bagi Pemerintah Provinsi Bali, apalagi munculnya hoaks klaster baru pada pemberlakuan kembali sekolah tatap muka. Guna mengatasi hal tersebut, diperlukan strategi untuk menangani penyebaran hoaks tersebut (Gambar 2.5).

Gambar 2.5 Penanganan Sebaran Isu Hoaks COVID-19



Sumber: Website Resmi Kominfo

Pada gambar 2.5 tersebut terdapat contoh penanganan sebaran isu hoaks COVID-19 pada periode 23 Januari 2020 – 28 Maret 2022 yang dilakukan oleh KOMINFO. Cara penanganan tersebut berhubungan pula dengan strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam menangani pemberitaan hoaks.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Setelah memaparkan deskripsi dan subjek penelitian pada BAB II, penulis akan menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan pada BAB III. Isi dari bab III adalah paparan temuan data yang diperoleh melalui wawancara dengan ketiga narasumber, yaitu Adhi Tiana Putra sebagai Kepala Seksi Pengendalian Operasi UPTD Pengendalian Bencana Daerah BPBD Provinsi Bali, I Gde Wirakusuma Wahyudi S.Sos sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi Informatika Statistik Kota Denpasar, dan Drs. I Gusti Ngurah Wiryanata, M.Si sebagai Kepala Bidang Publikasi dan Dokumentasi / Humas. Penelitian dilakukan secara online dengan memanfaatkan aplikasi Zoom.

#### **A. HASIL TEMUAN DATA PENELITIAN**

##### **1. Berita Hoaks**

Istilah hoaks menjadi istilah yang tak asing bagi masyarakat. Pada artikel yang diunggah pada website resmi Diskominfo Kabupaten Badung, hoaks merupakan informasi, kabar, berita yang palsu atau bohong, atau sebagai informasi yang dibuat-buat atau direkayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya (Diskominfo, 2022). Dengan beredarnya pemberitaan hoaks maka akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat.



*“Hoax sudah menyebar dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Jangan saling memecah belah”* (Berdasarkan penjelasan dari Septiaji Eko Nugroho dalam website Kementerian Komunikasi dan Informatika RI).

Dalam artikel yang diunggah oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI tersebut, berita hoaks tentunya bertolakbelakang dengan berita-berita yang positif sehingga akan menyebarkan berbagai informasi yang tidak benar (Yunita, 2017).

Kemudian, ketiga narasumber dalam penelitian ini pun menjelaskan masingmasing mengenai berita hoaks.

*“Pemberitaannya tidak memiliki hubungan logis dan terkesan mencari kebetulan.”* (Berdasarkan hasil Wawancara dengan Adhi Tiana Putra).

Narasumber pertama, Adhi Tiana Putra menjelaskan bahwa hoaks merupakan berita yang tidak memiliki hubungan logis dan berisikan pemberitaan yang memiliki kesan mencaai pembenaran. Selanjutnya narasumber kedua, I Gde Wirakusuma Wahyudi S.Sos, memiliki penjelasan yang cukup panjang mengenai berita hoaks.

*“Hoaks itu berbahaya, karena ya itu tadi, merugikan secara finansial, kemudian membuat teror secara psikososial, dan yang ketiga merugikan secara persatuan dan keamanan, karena hoaks juga mengandung adanya unsur SARA, kan bisa jadi fitnah.”*

Penjelasan mengenai berita hoaks tersebut, I Gde Wirakusuma Wahyudi S.Sos, selaku Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi Informatika Statistik Kota Denpasar menekankan bahwa berita hoaks yang

beredar berisikan informasi negatif yang bahkan berdampak sebagai ancaman bagi berbagai isu, seperti kesehatan dan bencana.

*“Kan hoaks seperti itu, video, foto, dan narasi yang dimuat ulang tetapi dalam konteks yang berbeda, sehingga bisa menimbulkan pemahaman yang berbeda.”* (Berdasarkan hasil wawancara dengan I Gde Wirakusuma Wahyudi S.Sos)

Berdasarkan penjelasan tersebut, I Gde Wirakusuma Wahyudi S.Sos, menambahkan bahwa hoaks tidak hanya berbentuk pemberitaan, namun dapat berbentuk video dan foto. Selanjutnya, narasumber ketiga, Drs. I Gusti Ngurah Wiryanata, Kepala Bidang Publikasi dan Dokumentasi / Humas menjelaskan bahwa berita hoaks berisikan informasi yang negatif yang dapat berpengaruh bagi sebagian masyarakat.

## **2. Berita Hoaks Klaster Baru pada Sekolah Tatap Muka di Provinsi Bali**

Tahun 2021 menjadi tahun ke-2 pandemi COVID-19. Dengan bermunculan jumlah kasus yang ada, tentu bermunculan juga pemberitaan hoaks yang memang menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Berdasarkan keterangan dari salah satu narasumber penelitian ini, terdapat salah satu komunitas yang mendata jumlah berita hoaks yang tersebar.

*“Ada pernyataan dari Presiden Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO), mereka ini adalah komunitas yang bergerak di bidang literasi digital, menyediakan tentang hoaks. Pada tahun 2021, yang berkaitan dengan hoaks itu hampir 395 jenis hoaks per bulan.”* (Berdasarkan hasil wawancara dengan I Gde Wirakusuma Wahyudi S.Sos)

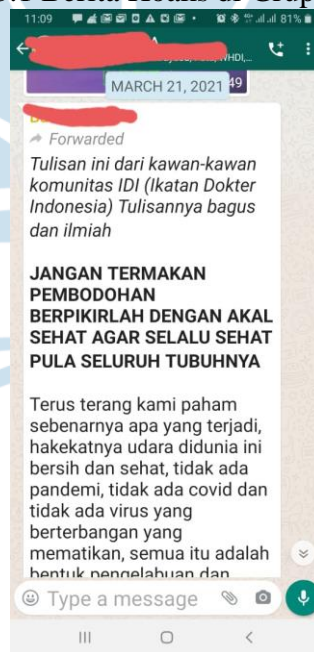
Tidak hanya MAFINDO yang mendata hoaks perbulannya, KOMINFO juga melakukan data pada pemberitaan hoaks yang hampir sama jumlahnya dengan

MAFINDO yaitu sekitar ada 1.500 hoaks yang sudah di verifikasi per Januari hingga Februari.

*“Iya, betul. Jadi kalau diteliti dari statistik KOMINFO, pernah itu dari Januari sampai Februari, atau sampai Maret, itu mereka ada 1.500 hoaks udah di verifikasi, hampir sama dengan MAFINDO, itu rata-rata kalau misalnya ada 1.500 hoaks di 3 bulan, berarti 1 bulan ada 500 berita hoaks kan. Nah, itulah kreatifnya orang Indonesia.”* (Berdasarkan hasil wawancara dengan I Gde Wirakusuma Wahyudi S.Sos)

Pada beberapa Group Whatsapp juga ditemukan beberapa berita hoaks yang tersebar di Provinsi Bali (Gambar 3.1)

Gambar 3.1 Berita Hoaks di Grup Whatsapp





*Sumber: Website Tangkal Hoax Denpasar*

Selanjutnya, I Gde Wirakusuma Wahyudi S.Sos, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi Informatika Statistik Kota Denpasar menjelaskan bahwa pemberitaan hoaks yang terjadi memang terus meningkat, khususnya mengenai kesehatan, apalagi ketika pandemi COVID-19. Situasi tersebut akhirnya disebut infodemi yang menyebabkan keresahan dimasyarakat, hingga mengancam isu kesehatan dan kebencanaan. Selain itu, kedua narasumber lainnya, hoaks mengenai adanya klaster baru pada pemberlakuan kembali sekolah tatap muka di Bali terkesan mencari kebetulan.

*“Lalu, dengan adanya hoaks juga mengancam isu kesehatan dan kebencanaan. Jadi isu yang sangat sensitif. Di Bali, khususnya sebagai daerah pariwisata itu, sangat rentang terhadap isu keamanan, kesehatan, dan kebencanaan. Jadi, kita berangkat dari situ.”* (Berdasarkan hasil wawancara dengan I Gde Wirakusuma Wahyudi S.Sos)

Namun dengan peningkatan hoaks yang berbedar dimasyarakat, I Gde Wirakusuma Wahyudi S.Sos menjelaskan bahwa hoaks tentang penutupan

sekolah akibat COVID tidak ada. Data yang didapatkan oleh Pemerintah Provinsi Bali tersebut diteruskan kepada Dinas Pendidikan untuk kemudian disebar. Hal tersebut dilakukan sekaligus sebagai langkah penanganan secara lokal.

*“Jadi sampai saat ini belum pernah ada terjadi adanya hoaks yang terkait dengan masa belajar offline sekolah karena memang penanganannya langsung berdasarkan kasus harian yang ada datanya, jadi tidak ada misalnya cerita bohong siswa A sekian orang terverifikasi, tentu tidak..”* (Berdasarkan hasil wawancara dengan I Gde Wirakusuma Wahyudi S.Sos)

Walaupun begitu, tentunya Pemerintah Provinsi Bali tetap menanggulangi adanya hoaks mengenai COVID lainnya, melalui tanggapan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali, salah satunya melaksanakan vaksin dan menerapkan protokol kesehatan di sekolah.

*“Pemerintah Provinsi Bali mengimbangi dengan data yang terkait dengan sekolah tatap muka seperti jumlah tenaga pendidik dan siswa yang sudah divaksin Covid-19 dan penerapan protokol kesehatan di sekolah.”* (Berdasarkan hasil Wawancara dengan Adhi Tiana Putra).

Menanggapi situasi tersebut, maka Pemerintah Provinsi Bali langsung cepat tanggap untuk mengimbangi data penyebaran hoaks dengan menggalakan vaksin, sekaligus penegasan untuk penerapan protokol kesehatan di sekolah. Hal tersebut salah satunya dilakukan dengan memanfaatkan website resmi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali yang mengunggah “Himbauan Pemerintah Provinsi Bali dalam Penanggulan COVID-19”. Selain Pemerintah, masyarakat pun menanggapi pemberitaan hoaks tersebut. Menurut

salah satu penjelasan narasumber, Drs. I Gusti Ngurah Wiryanata, M.Si, selaku Kepala Bidang Publikasi dan Dokumentasi / Humas, masyarakat sudah disiplin dan tanggap sehingga tidak berpengaruh bagi mereka. Namun yang disiplin dan tanggap hanya sebagian dari masyarakat, sebagian lainnya terpengaruh akibat adanya berita hoaks. Hal tersebut akhirnya membuat masyarakat tergiring opini yang tidak berdasarkan kekuatan sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat.

*“Iya meresahkan, merugikan, menurunkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Merugikan masyarakat, karena kehilangan manfaat, dari yang seharusnya dia dapatkan, jadi gak jadi.”* (Berdasarkan hasil wawancara dengan I Gde Wirakusuma Wahyudi S.Sos)

Keresahan masyarakat tentunya muncul akibat ketakutan pada pandemi COVID-19, apalagi penyebaran berita hoaks tentunya menambah ketakutan tersendiri bagi masyarakat, sehingga akhirnya masyarakat tidak mendapatkan manfaat dari penyebaran berita yang tidak benar tersebut. Hal tersebut diperkuat dengan salah satu artikel berita yang diunggah oleh [bali.antaranews.com](http://bali.antaranews.com), yang memberikan penjelasan bahwa akibat adanya hoaks dapat berdampak buruk hingga psikologi masyarakat di Bali (Antara, 2019).

Selanjutnya, terdapat penjelasan yang berbeda mengenai situasi akibat tersebarnya pemberitaan hoaks klaster baru pada sekolah tatap muka di Provinsi Bali. Adhi Tiana Putra yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pengendalian Operasi UPTD, Pengendalian Bencana Daerah BPBD Provinsi Bali menjelaskan bahwa situasi tersebut tidak menjadi situasi krisis. Sedangkan



kedua narasumber lainnya memandang situasi penyebaran hoaks sebagai situasi krisis karena merugikan masyarakat, bahkan menjadi perhatian tersendiri bagi Pemerintah Provinsi Bali dengan penuh hati-hati dan tetap cermat dalam menentukan langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Satusatunya narasumber yang menjawab penyebab situasi krisis adalah I Gde Wirakusuma Wahyudi S.Sos.

*“Satu transformasi digital yang begitu pesat, hampir semua kehidupan sekarang bertransformasi ke digital.”* (Berdasarkan hasil wawancara dengan I Gde Wirakusuma Wahyudi S.Sos)

Transformasi digital tersebut terjadi seiring dengan perkembangan pesat media sosial, khususnya di wilayah Denpasar. Berdasarkan data statistika tahun 2020 yang diungkapkan dari wawancara dengan I Gde Wirakusuma Wahyudi S.Sos, data pengguna media sosial di Denpasar, 8 jam perhari. Kemudian di Indonesia pengguna internet mencapai 170 juta orang.

*“Bayangkan saja kalau sebagian besar dari pengguna koneksi internet tersebut adalah pengguna media sosial, nah dari situlah gimana hoaks bisa menyebar luas karena satu memang transformasi digital yang berkembang pesat, sedangkan masyarakat belum dibekali kecakapan digital yang memadai, jadi literasi digital itu penting untuk mereka memahami bagaimana seharusnya beraktivitas digital yang cakap, bijak dan berbudaya.”* (Berdasarkan hasil wawancara dengan I Gde Wirakusuma Wahyudi S.Sos)

Namun, menjadi situasi yang membingungkan karena terdapat satu narasumber yang tidak setuju dengan situasi penyebaran hoaks sebagai situasi krisis, namun nyatanya Pemerintah Provinsi Bali memang menyadari situasi krisis tersebut

hingga terus berupaya dan penuh kehati-hatian untuk menegaskan masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan.

Banyak pihak yang dirugikan terkait situasi tersebut. Masyarakat hingga pemerintah pun menjadi korban, karena mengancam banyak faktor dalam berbagai aspek kehidupan.

*“.....sebenarnya hoaks secara umum itu mengganggu secara finansial. Jadi secara psikososial itu membuat resah. Lalu, dengan adanya hoaks juga mengancam isu kesehatan dan kebencanaan. Jadi isu yang sangat sensitif. Di Bali, khususnya sebagai daerah pariwisata itu, sangat rentang terhadap isu keamanan, kesehatan, dan kebencanaan. Jadi, kita berangkat dari situ.”* (Berdasarkan hasil wawancara dengan I Gde Wirakusuma Wahyudi S.Sos)

Memang terdapat banyak aspek kehidupan yang dirugikan atas tersebarnya hoaks di Pemerintah Provinsi Bali, mulai dari mengganggu finansial, kesehatan hingga kebencanaan. Bahkan, merugikan Provinsi Bali sebagai daerah pariwisata. Selain itu, dengan kerugian yang terjadi, situasi penyebaran berita hoaks dapat dikatakan menjadi peristiwa, baik disengaja maupun tidak sengaja.

*“Kategori hoaks itu kan ada 4 tuh. Ada yang sengaja membuat, ada yang tidak sengaja menyebarkan.....”* (Berdasarkan hasil wawancara dengan I Gde Wirakusuma Wahyudi S.Sos)

Situasi hoaks yang terjadi di Provinsi Bali dapat dikategorikan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik Kota Denpasar, kategori tersebut salah satunya dapat dibagi menjadi disengaja maupun tidak disengaja. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk adanya transformasi ke digital dengan tingkat aktivitas di media sosial yang tinggi sehingga hoaks pun



bisa menyebar secara luas, termasuk masyarakat yang belum dibekali kecakapan digital yang memadai atau kurangnya literasi digital.

### **3. Upaya Menangani Berita Hoaks Klaster Baru pada Sekolah Tatap Muka di Provinsi Bali oleh Pemerintah Provinsi Bali**

Penyebaran berita hoaks klaster baru pada sekolah tatap muka di Provinsi Bali menjadi perhatian khusus Pemerintah Provinsi Bali untuk melakukan upaya menangani situasi tersebut. Berdasarkan penjelasan dari I Gde Wirakusuma Wahyudi S.Sos, telah menjadi tugas pemerintah sebagai regulator untuk memberikan panduan dan aturan, khususnya melalui tim yang sudah terbentuk.

*“Jadi intinya kami punya website untuk edukasi sebenarnya, jadi kami punya tim untuk mendeteksi ketika ada hoaks. Nah tim itu kemudian mengambil biasanya berita-berita hoaks, misalnya di Whatsapp, karena di Indonesia penggunaannya tinggi, dari platform-platform lainnya. Bahkan, di dunia peringkat ke-5. Nah dengan kepopuleran itu, jadinya penyebaran hoaks jadi sangat masif di Whatsapp. Jadi Whatsapp, itu tertinggi, karena itu platform yang digunakan orang-orang untuk berbagi informasi. Nah akhirnya dengan melihat hal tersebut, sekarang penyebaran informasi di Whatsapp, forward message itu sekarang dibatasi kan penyebarannya, dibatasi hanya sekali saja..... Nah ketika kita verifikasi, verifikasinya tidak menyebar sama kayak gitu, kadang yang membaca hoaks sebenarnya ada yang tidak ikut menyebarkan. Itu jadi salah satu tantangan.”* (Berdasarkan hasil wawancara dengan I Gde Wirakusuma Wahyudi S.Sos).

Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali adalah edukasi melalui website dengan pembentukan tim khusus untuk mendeteksi ketika terdapat hoaks. Website tersebut bertujuan untuk mengedukasi secara

preventif yang dilakukan oleh tim khusus. Hal tersebut terus dilakukan karena Pemerintah Provinsi Bali melihat bahwa berita-berita hoaks yang tersebar ditengah masyarakat sangat dimodifikasi dengan bagus, berisikan pesan positif, nasihat, hingga mencantumkan para ahli, dokter, tokoh, dan sebagainya.

*“Nah kalau kita kan hanya bisa melakukan edukasi, tujuannya apa, karena supaya masyarakat lebih memahami literasi digital, jadi mereka tidak mudah membagikan hoaks, tidak mudah menyebarkan, tanpa sengaja, karena kadang-kadang tanpa sengaja.”* (Berdasarkan hasil wawancara dengan I Gde Wirakusuma Wahyudi S.Sos)

Tim khusus tersebut adalah tim dari SATGAS untuk memiliki tugas mengumpulkan dan mengolah data terkait penanganan COVID-19. Tim khusus yang menangani hoaks tersebut ditugaskan untuk mendeteksi ketika terdapat hoaks, sehingga harus mengambil beritaberita tersebut. Berdasarkan keterangan I Gde Wirakusuma Wahyudi S.Sos saat diwawancarai oleh penulis, langkah-langkah yang dilakukan oleh Tim SATGAS tersebut diantaranya mendeteksi pemberitaan hoaks melalui pencarian berita, verifikasi benar atau tidaknya berita hoaks yang ditemukan untuk dikirimkan ke tim, mengunggah berita yang benar untuk dilanjutkan oleh Tim Publikasi dan kemudian dikirimkan kembali ke Grup Whatsapp dimana asal berita hoaks tersebut tersebar. Selain itu, tim khusus tersebut juga mengunggah ke media-media sosial milik Pemerintah Provinsi Bali.

*“Jadi, masyarakat yang tidak terpapar hoaks tersebut, mengetahui, karena hoaks itu sifatnya, istilahnya hoaks lama bersemi kembali.. Hahah.. Karena satu bulan, dua bulan, nanti muncul lagi dan sudah dimodifikasi, biasanya judulnya*

*diperbaiki, isinya ditambahkan.. Ya seperti itu mekanismenya..”*  
(Berdasarkan hasil wawancara dengan I Gde Wirakusuma Wahyudi S.Sos).

Langkah yang dilakukan oleh Tim SATGAS khusus tersebut bertujuan untuk mengedukasi secara preventif.

*“.....karena kita di pemerintah kota sih kesulitan kalo penegakan hukum, itu kan ranah kepolisian. Nah kalau kita kan hanya bisa melakukan edukasi, tujuannya apa, karena supaya masyarakat lebih memahami literasi digital, jadi mereka tidak mudah membagikan hoaks, tidak mudah menyebarkan, tanpa sengaja, karena kadang-kadang tanpa sengaja.”* (Berdasarkan hasil wawancara dengan I Gde Wirakusuma Wahyudi S.Sos)

Kemudian, salah satu upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Dispora terkait kemunculan berita hoaks mengenai pemberlakuan sekolah tatap muka sehingga berita hoaks tersebut tidak sampai ke masyarakat.

Selain upaya melalui penemuan, verifikasi hingga pengungkahan tersebut, upaya yang dilakukan lainnya melalui pengungkahan artikel di beberapa website, baik dari website resmi Pemerintah Provinsi Bali, maupun beberapa website dari portal berita online lainnya. Salah satu contoh artikel yang mengungkap upaya tersebut adalah upaya dari Polda Bali yang melakukan *take down* terhadap 245 akun media sosial yang menyebarkan berita hoaks (Suadnyana, 2021). Artikel-artikel atau berita lainnya juga diunggah oleh website resmi dari Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali yang secara rutin memperbarui website yang menginformasikan dan mengedukasi masyarakat mengenai COVID-19, seperti Surat Edaran Satuan

Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 12 Tahun 2021, Keputusan Bersama Gubernur Bali dan Bandesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali tentang Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Penanganan COVID19 Berbasis Desa Adat di Bali, hingga Surat Edaran Gubernur Bali tentang Penguatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Bali. Tidak hanya artikel website resmi, beberapa pemberitaan yang ada melalui portal berita online yang ditemukan, dengan headline sebagai berikut:

The image is a screenshot of a news article on the Kompas.com website. The article is titled "Menkes Sebut Hoaks Kabar Ribuan Lebih Sekolah PTM Jadi Klaster Covid-19" and is dated 27/09/2021, 18:49 WIB. The main image shows a classroom with several students sitting at desks, some wearing face masks. The article is surrounded by various social media sharing icons and a "Lihat Foto" button. There are also several smaller article teasers on the left and right sides of the main article, including one about hair growth and another about cholesterol. The website's navigation bar at the top includes categories like NEWS, TREK, VIDEO, LESTARI, HEALTH, FOOD, EDUKASI, PARAPUAN, MONEY, UMM, TEKNO, LIFESTYLE, HOMEY, PROPERTI, BOLA, TRAVEL, OTOMOTIF, SAINS, HYPE, VIK, KOLON, JED, and FOTO. The URL bar shows "Kompas.com / News / Nasional".

Sumber: Portal Berita Kompas.com

**18**  
12-2020

Hoaks [HOAKS] Mendikbud: Belajar Tatap Muka Resmi Januari 2021,

**[HOAKS] Mendikbud: Belajar Tatap Muka Resmi Januari 2021, Anak Wajib Swab Test sebelum Sekolah**

Kategori Hoaks | mth

Jum'at, 18 Desember 2020 Berita UH

**Belajar Tatap Muka RESMI Januari 2021, Anak Wajib Swab Test Sebelum Sekolah**

Senin, 14 Desember 2020 jber 14, 2020

Komentar 17



KOMITE PENYANGGULANGAN COVID-19  
KEMENTERIAN KOMINFO

- Belajar Tatap Muka RESMI Januari 2021, Anak Wajib Swab Test Sebelum Sekolah. Mulai Januari 2021, rencananya sekolah sudah bisa melakukan pembelajaran tatap

**KATEGORI BERITA**

- Berita Kementerian
- Berita Pemerintahan
- Siaran Pers
- Sorotan Media

**TERPOPULER**

**Berita Pemerintahan** 05-01-2023  
Pemerintah Lanjutkan Kartu Prakerja 2023 dengan Skema Normal  
Dibaca 3581 Kali

**Siaran Pers** 13-01-2023  
Siaran Pers No. 6/HM/KOMINFO/01/2023 tentang

*Sumber: Kominfo*

Home > Nasional > Hoax! Kluster Covid-19 Saat Pemberlakuan PTM

**Hoax! Kluster Covid-19 Saat Pemberlakuan PTM**

By Admin Bogor Daily 28 September 2021

Share



**Trending**

Nasional  
**AKBP Achiruddin Hasibuan Akpol Tahun Berapa? Ini Profil dan Sepak Terjangnya**

Hiburan  
**Baca Komik One Piece 1083 di Komikcast, Cek!**

Viral  
**Video Viral Wanita Bercadar di Kebun Teh Ciwidey Bikin Geger!**

Nasional  
**AKBP Buddy Towoliu Akpol Tahun Berapa? Ini Profil dan Jejak Karirnya**

Kabupaten Bogor  
**Sungai Ciapus Meluap, Ciomas Banjir Bandang**

*Sumber: Bogordaily.net*



SAMSUNG

Hikmah Ramadan  
Kartu Kredit Syariah  
Rp 4.584.000

Galaxy S23 Ultra (Online Exclusive)  
Rp 21.999.000

Galaxy S23  
Rp 13.999.000

**Ribuan Sekolah Dikabarkan Jadi Klaster Covid-19**  
**Menkes: Hoaks, Nggak Benar!**

Reporter & Editor:  
ACHMAD ALI FUTHUHIN

Nasional

Selasa, 28 September 2021 07:20 WIB

TERPOPULER

- 1 Melesat 132 Persen, Bank Mandiri Targetkan Kartu Kredit Tumbuh 35-40...
- 2 Erick Makin Wangi
- 3 Mall Ciputra Jakarta Kembali Gelar Festival Kuliner Pecinan

Sumber: CNBC Indonesia

antaranews.com/berita/1473069/polisi-tangkap-pelaku-penyebar-hoaks-terkait-covid-19-di-bali#mobile-src

HOME POLITIK HUKUM EKONOMI METRO SEPAKBOLA OLARHAGA HUMANIORA LIFESTYLE HIBURAN NUSANTARA DUNIA ENGLISH

FOKUS INFOGRAFIK FOTO VIDEO TEKNO OTOMOTIF WARTA BUMI KARKHAS ANTI HOAX ANTARA INTERAKTIF RAMADHAN RILIS PERS INDEKS

**Polisi tangkap pelaku penyebar hoaks terkait COVID-19 di Bali**

© Rabu, 6 Mei 2020 21:51 WIB

Illustrasi - hoaks (Foto Antaranews)

COMPLEXION CARE SHOWER  
Shower With Purified Water

Get Youthful Healthy skin  
Champs Industrial

DATA PERKEMBANGAN COVID-19

DIRAWAT  
**5.607**

|                |           |           |
|----------------|-----------|-----------|
| TERKONFIRMASI  | SEMBUH    | MENINGGAL |
| 6.727.847 +238 | 6.561.463 | 160.777   |

DATA PER PROVINSI

Sumber: covid19.go.id last update: 22-01-2023 04:45 WIB

Sumber: Website Antaranews

Home Berita Jabodetabek Internasional detikX Kolom Blak Blakan Pro Kontra Infografis Foto Video Indeks

Adsmart\* Terpopuler Hoax or Not Suara Pembaca Pemilu 2024\* The Matchmaker\*

ADVERTISEMENT

ACE The helpful place. Siapkan momen kebersamaan #BisaKejadian hingga 4 April 2023

Cashback 10% Rp 300\* t/bu

detikNews > Berita

**2 Pekan PPKM Darurat, Polda Bali Takedown 245 Akun Medsos Sebar Hoax COVID**

Sui Suadnyana - detikNews  
Jumat, 16 Jul 2021 13:22 WIB

ADVERTISEMENT

Loz\*calDaily Spesial Ulang Tahun! DISKON hingga 80% BELI SEKARANG >

detik PEMILU TOP 5 Capres Cawapres Pilihan di THE MATCHMAKER Voting Sekarang! DI SINI

Sumber: Website Detiknews

Tribun-Bali.com Jumat, 3 Maret 2023 Cari Network Ikuti Kami Login

Home News Mata Lokal Memilih Bali Yamaha Budaya Bisnis Super Ball Bali United Sport Lifestyle Epaper Lainnya

Home > Bali

Corona di Bali

**Pemprov Bali Rilis Laporan Adanya Hoaks dan Disinformasi Mengenai Covid-19**

Minggu, 19 April 2020 17:13

Penulis: I Wayan Sui Suadnyana | Editor: Aloisius H Manggol

lihat foto

Coronavirus COVID-19

f t w p in

IKLAN BY MGID

Tak Perlu Laser jika Mata Mulai Kabur! Ternyata Cukup Lakukan Ini

Advertisement

Rambut Anda akan tumbuh kembali!

Rambut Pasti Tumbuh Lebat! Tak Peduli Seberapa Parah Botak

berita POPULER

Banyak Pasien Diabetes Indonesia Nyetal Tak Cepat Tau Ini

Sumber: Website Tribun-Bali

Tribun-Bali.com

Jumat, 3 Maret 2023

Cari Network Ikuti Kami Login

Home News Mata Lokal Memilih Bali Yamaha Budaya Bisnis Super Ball Bali United Sport Lifestyle Epaper Lainnya


Home Bali

Corona di Bali

# Pemprov Bali Rilis Laporan Adanya Hoaks dan Disinformasi Mengenai Covid-19

Minggu, 19 April 2020 17:13

Penulis: I Wayan Sui Suadnyana | Editor: Aloisius H Manggol



lihat foto

f

t

wh


in

share

IKLAN BY MGID

Tak Perlu Laser jika Mata Mulai Kabur! Ternyata Cukup Lakukan Ini

Advertisement



Rambut Anda akan tumbuh kembali!

Rambut Pasti Tumbuh Lebat! Tak Peduli Seberapa Parah Botak

berita POPULER

Banyak Pasien Diabetes Indonesia Nyesal Tak Ceat Tau Ini

Sumber: Website Tribun-Bali

liputan6.com/regional/read/4202153/beredar-informasi-hoaks-bali-lockdown-akibat-virus-corona

Home > Regional > Bali Nusra

## Beredar Informasi Hoaks Bali Lockdown Akibat Virus Corona

Dewi Divianta

15 Mar 2020, 03:30 WIB

f t e Copy Link Share 35



Perbesar

Sekda Pemerintah Provinsi Bali yang juga Ketua Satgas Penanggulangan Covid-19, Dewa Made Indra meluruskan informasi hoaks yang menyebutkan jika Bali lockdown pada tanggal 25 Maret 2020 (Liputan6.com/Dewi Divianta)

TOPIK POPULER

JADWAL ACARA HARI INI

SCTV

LIVE Panji Petualang 911

14:15 Awas Tercyduk!

15:30 Rindu Bukan Rindu

SELENGKAPNYA

POPULER

Lihat Semua >



Sumber: Website Liputan6.com



Pemerintah Provinsi Bali juga memiliki salah satu website khusus untuk tanggal hoaks melalui website <https://tangkalhoax.denpasarkota.go.id/>. Selain website hingga portal berita, terdapat upaya edukasi yang dilakukan melalui literasi digital, khususnya melalui media sosial, karena menjadi salah satu media yang efektif, dilihat dari kecepatan dan responsif.

*“Kita ada beragam media sosial, ada IG, ada Youtube, ada Facebook, ada Twitter, ada website.”* (Berdasarkan hasil wawancara dengan I Gde Wirakusuma Wahyudi S.Sos).

Harapan dengan adanya beberapa media sosial tersebut tentunya supaya masyarakat Bali dapat mengakses informasi dari berbagai *platform* yang ada dan dikelola secara resmi oleh Pemerintah Provinsi Bali. Kemudian, literasi digital tersebut dilakukan secara konsisten memantau kabar atau pemberitaan yang beredar dengan potensi atau sudah meresahkan masyarakat dengan info yang faktual melalui berbagai media.

*“Ya, melakukan penyampaian pesan yang mengimbangi kabar-kabar hoaks beredar dengan menyajikan info berdasar fakta melalui berbagai media.”* (Berdasarkan hasil Wawancara dengan Adhi Tiana Putra)

Selain itu, Pemerintah Provinsi Bali melakukan kerjasama dengan berbagai jenis media, guna menangkal situasi tersebut. Kerjasama tersebut dilakukan secara konsisten sehingga dapat memantau kabar hoaks yang beredar, sehingga peran media dapat memberikan informasi yang faktual sesuai fakta yang ada. Salah satunya website berita yang mengunggah informasi mengenai Provinsi Bali, [birohukum.baliprov.go.id](http://birohukum.baliprov.go.id). Dalam artikel tersebut,

terdapat penjelasan mengenai klarifikasi terkait disinformasi dan hoaks yang telah beredar di masyarakat melalui media sosial pada tanggal 27 Maret 2020 (Biro Hukum, 2023).

SURAT EDARAN & PENGUMUMAN

## Klarifikasi Terkait Disinformasi Dan Hoax yang Telah Beredar di Masyarakat Melalui Media Sosial pada Tanggal 27 Maret 2020

27 Maret 2020



Sumber : Whatsapp

### BEREDAR INFORMASI :

Telah beredar pesan di Whatsapp : "Dihimbau agar jangan ke kompleks perkantoran propinsi di renon dan sekitarnya dumun karena PNS di propinsi sudah 7 orang yg sudah kena virus covid 19 Diantaranya Sekpri dinas perhubungan, Kadis dan istrinya, Kadis perindag, Sekretaris badan perijinan dan usahakan jangan makan dan membeli makanan di seputaran renon meski lewat gojek atau grab apalagi datang kesans "

### KATEGORI INFORMASI : HOAX

### PENJELASAN :

Pada tanggal 27 Maret 2020 sudah dikonfirmasi bahwa seluruh PNS Provisi Bali yang disebutkan dalam WA tersebut dalam kondisi yang baik-baik. Namun demikian tetap dihimbau kepada seluruh masyarakat agar mematuhi himbauan untuk mengurangi aktivitas luar rumah kecuali keperluan yang sangat mendesak,

Dokumen ini menggunakan Tanda Tangan Elektronik



Sumber: Biro Hukum Provinsi Bali



Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 20 Tahun 2022

Rahm, 22 Juni 2022



Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 15 Tahun 2022

Rahm, 24 Mei 2022



PROTOKOL KESEHATAN PELAKU PERJALANAN LUAR NEGERI KHUSUS PINTU MASUK BALI, BATAM, DAN BINTAN DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Mingga, 22 Maret 2022



KETENTUAN ORANG PERJALANAN DALAM NEGERI PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19)

Sabtu, 12 Maret 2022



Surat Keputusan Ketua Satgas COVID-19 Nomor 3 Tahun 2022

Sabtu, 23 Februari 2022



Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 12 Tahun 2021

Sabtu, 29 Maret 2021



Dinas Kominfo Bali Ikuti Vaksinasi COVID-19 Tahap Satu

Rahm, 4 April 2021



Keputusan Bersama Gubernur Bali dan Bandesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali tentang Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Penanganan COVID-19 Berbasis Desa Adat di Bali

Sabtu, 16 Februari 2021



Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Bersama Diskominfo Bali Adakan Pelatihan Uji Coba Dashboard Sistem Informasi Eksekutif Penanganan COVID-19 di Provinsi Bali

Rahm, 28 September 2020



Surat Edaran Gubernur Bali Tentang Penguatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Bali

Rahm, 27 September 2020

Sumber: Website Resmi Provinsi Bali

Hingga saat ini, Pemerintah Provinsi Bali sangat terbuka dalam penyampaian informasi melalui pemanfaatan saluran informasi, khususnya mengadakan konferensi pers yang dilakukan hampir setiap hari, bahkan jika ada hoaks disampaikan pula pada saat konferensi pers.

*“Disetiap kesempatan dan ada perkembangan regulasi selalu melaksanakan konpers..”* (Berdasarkan wawancara dengan Drs. I Gusti Ngurah Wiryanata, M.Si)

Drs. I Gusti Ngurah Wiryanata menjelaskan bahwa konferensi pers tersebut masih efektif untuk dilakukan, apalagi ditambah dengan peran media-media online terkemuka, serta didukung dengan media sosial dan media konvensional lainnya, seperti televisi, koran dan radio. Dengan penyelenggaraan Konferensi Pers yang secara rutin dilakukan, Pemerintah dapat melakukan *update* dari segala kebaruan yang terjadi di Provinsi Bali, apalagi mengenai pandemi COVID-19, secara khusus mengenai penyebaran hoaks. Hal tersebut salah satunya dilakukan melalui pengunggahan hasil Konferensi Pers pada akun Facebook dari Pemerintah Provinsi Bali. Konten tersebut berisikan tulisan mengenai *update* kebijakan mengenai peraturan dalam rangka menghadapi situasi pandemi COVID-19 (Pemerintah Provinsi Bali, 2020). Kemudian, Pemerintah Provinsi Bali dengan mengupayakan langkah-langkah strategis dalam penanganan situasi tersebut dengan tetap menekankan protokol kesehatan. Selain itu, hampir semua media dilibatkan dan sangat membantu Pemerintah. Salah satunya mengajak kerjasama Kominfo guna mengajak pelajar di Provinsi Bali untuk bersama-sama memerangi hoaks mengenai pandemi COVID-19 (Kominfo, 2020). Dengan begitu, seluruh organisasi Pemerintah Provinsi Bali memainkan peran masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsinya. Selain Pemerintah, masyarakat pun harus dapat mendukung

upaya-upaya tersebut, untuk tidak ikut menyebarkan berita yang diterima hingga melakukan uji silang terkait fakta ke sumber-sumber terpercaya.

*“Iya, betul. Jadi biasakan sekarang, kita latih sih dengan berkali-kali sosialisasi itu supaya tidak mudah untuk menerima, mempercayai dan menyebarkannya kembali. Harus selalu cek dan ricek.”* (Berdasarkan hasil wawancara dengan I Gde Wirakusuma Wahyudi S.Sos).

Dengan adanya sosialisasi yang secara berulang tentunya dapat membiasakan masyarakat untuk tidak mudah menerima dan percaya, serta dapat lebih cerdas dalam memilih hingga memilih pemberitaan yang tersebar luas dimasyarakat. Oleh karena itu, masyarakat pun perlu membantu upaya yang sudah dilakukan Pemerintah. Menurut salah satu narasumber, masyarakat sebenarnya dapat menunda dalam penyebaran berita hoaks yang ada.

*“Masyarakat seharusnya dapat menunda untuk segera menyebarkan berita yang diterima, melakukan uji silang terkait fakta ke sumber-sumber terpercaya.”* (Berdasarkan hasil Wawancara dengan Adhi Tiana Putra)

Selain itu, masyarakat dapat mengimplementasikan ketiga poin penting yang dipaparkan oleh Kementerian Kominfo. Tiga poin tersebut diantaranya cakap yang artinya memiliki pemahaman dan pengetahuan untuk dapat berinteraksi digital dengan baik, bijak berarti menggunakan rasa yang mengukur ketakutan pemberitaan tersebut baik atau buruk, dan beretika atau berbudaya berarti seseorang dapat berinteraksi secara digital sesuai dengan adat ketimuran. Oleh karena itu apabila ketiga poin penting tersebut tidak dapat dilakukan maka penyebaran berita hoaks pun akan terus meningkat.

*“Jadi ini yang kita lihat bahwa masyarakat belum mempunyai kecakapan, kebijaksanaan dan etika dalam berinteraksi di dunia internet. Nah itulah penyebab hoaks, lalu muncul juga konten-konten yang kurang pantas. Muncul hal-hal yang harusnya tidak dipublikasikan, justru dipublikasi. Jadi karena kurangnya kecakapan masyarakat dalam literasi digital, dalam proses interaksi dengan dunia digital. Ini terjadi karena kecepatan perkembangan transformasi digital tidak seiring dengan pemahaman tentang bagaimana berinteraksi digital yang baik.”*  
(Berdasarkan hasil wawancara dengan I Gde Wirakusuma Wahyudi S.Sos)

Ketiga poin penting tersebut dapat dilakukan oleh masyarakat dengan lebih cakap, bijak, dan beretika ketika membaca artikel pemberitaan yang beredar ditengah-tengah masyarakat.

## **B. Analisis Data**

Menurut Pellegrini (Juditha, 2018) memaparkan penjelasan dalam perkembangan definisi hoaks yaitu sebuah kebohongan yang dikarang sedemikian rupa oleh seseorang bertujuan untuk menutupi atau mengalihkan perhatian dari kebenaran demi kepentingan pribadi, baik intrinsik maupun ekstrinsik. Dengan penjelasan mengenai pengertian hoaks tersebut, maka ciri-ciri dari berita hoaks, antara lain redaksi pemberitaan tidak ada, memiliki sifat sensasional, bermuatan kata proaktif, seperti *“Sebarkan!”*, *“Lawan!”* atau *like* dan *share* sebelum terlambat, berita *expired* dan terkesan diskriminatif, tempat dan tanggal tidak jelas, alur cerita yang tidak logis dan aneh, serta menekankan pada isu sara. Ketiga narasumber dalam penelitian ini, menyetujui penjelasan mengenai berita hoaks tersebut yang menekankan bahwa berita hoaks yang beredar dalam masyarakat berisikan berita-berita bohong, dengan penuh rekayasa.

Dengan tersebarnya pemberitaan hoaks maka akan menimbulkan dampak negatif, salah satunya menurut narasumber I Gde Wirakusuma Wahyudi S.Sos, dengan adanya berita hoaks menimbulkan situasi yang berbahaya sehingga merugikan secara finansial, membuat terror psikososial, hingga dapat merugikan persatuan dan keamanan karena hoaks berisikan unsur SARA hingga memicu terjadinya fitnah. Kemunculan hoaks yang beredar di masyarakat Pemerintah Provinsi Bali hingga saat ini dalam berbagai bentuk, baik video, foto, hingga artikel pemberitaan. Meskipun kemunculan hoaks mengenai pemberlakuan sekolah tatap muka tidak terlalu banyak di Provinsi Bali, namun hoaks tentu tetap perlu diperangi karena masuk sebagai situasi yang krisis.

Menurut (Prastya, 2016), situasi krisis dapat terjadi karena adanya tiga kondisi, diantaranya elemen-elemen yang sifatnya tidak terduga, informasi yang tidak mencukup, dan cepatnya dinamika yang terjadi. Berdasarkan penjelasan tersebut, kemunculan hoaks mengenai klaster baru pada sekolah tatap muka di Bali menjadi sebuah situasi krisis, seperti yang disampaikan oleh kedua narasumber, I Gde Wirakusuma Wahyudi S.Sos dan Drs. I Gusti Ngurah Wiryanata, M.Si. Situasi krisis yang dimaksudkan karena menurut hasil wawancara, situasi penyebaran hoaks yang terjadi tentu menunjukkan situasi yang sebenarnya tidak terduga akibat transformasi digital, sehingga adanya kekurangan literasi yang dialami oleh masyarakat sendiri. Selain itu, tentunya penyebab tersebut berkaitan dengan cepatnya dinamika yang terjadi disekitar, dimana ketika pandemi COVID-19 adanya perubahan yang cukup pesat karena aktivitas masyarakat dalam bermedia



sosial menjadi lebih tinggi. Selain itu, kondisi lainnya adalah terkait penyebaran informasi yang tidak mencakup sehingga masyarakat pun mudah tergiring opini yang tidak berdasar sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat. Namun, situasi krisis yang dijelaskan oleh dua narasumber, menjadi berbeda dengan Kepala Seksi Pengendalian UPTD, Pengendalian Bencana Daerah BPBD Provinsi Bali yaitu Adhi Tiana Putra yang menyatakan situasi penyebaran hoaks tidak menjadi situasi krisis.

Situasi krisis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyebaran berita secara cepat, sejalan dengan Millar & Heath (Prastya, 2016) karena dapat mengontrol masyarakat, meresahkan, merugikan, bahkan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, mengganggu segala aspek kehidupan, khususnya seluruh pihak, baik masyarakat hingga pemerintah di Bali, karena mengganggu secara finansial, psikososial, hingga mengganggu kesehatan dan kebencanaan. Kemudian, situasi krisis ini terjadi karena arus informasi yang terus meningkat, terlebih selama pandemi COVID-19, sama halnya seperti yang sudah dijelaskan terkait transformasi digital yang tidak diimbangi literasi digital yang baik dari masyarakat.

Dalam penelitian ini, peneliti pun menganalisis terkait teori situasional komunikasi krisis yang menjadikan krisis menjadi peristiwa negatif yang tidak terduga dan tidak disangka sehingga memungkinkan *stakeholder* memiliki atribusi mengenai krisis. Hal tersebut sejalan dengan kekhawatiran Pemerintah terdapat masyarakat yang akhirnya tidak mempercayai Pemerintah lagi. Terdapat jenis



krisis yang dibagi menjadi tiga kelompok, dimana akhirnya munculnya berita hoaks mengenai klaster baru sekolah tatap muka disebut situasi krisis (Indasari & Anggriani, 2020):

1. Menimbulkan korban, dalam hal ini tentunya seluruh pihak, masyarakat hingga pemerintah karena mengganggu seluruh aspek kehidupan.
2. Situasi yang terjadi karena ketidaksengajaan, salah satunya transformasi digita yang begitu pesat, hampir seluruh aspek kehidupan. Apalagi, situasi pandemi COVID-19 banyak merubah keadaan sehingga sebagian besar masyarakat akhirnya terhubung dengan internet sehingga hoaks pun lebih mudah untuk menyebar secara luas, dengan tidak diimbangi bekal kecapan digital masyarakat secara digital yang memadai.
3. Krisis yang dapat dicegah oleh berbagai pihak yang disebut korban, karena upaya yang dilakukan Pemerintah pun harus diimbangi oleh masyarakat yang tidak mudah untuk menyebarluaskan berita hoaks secara mudah dan bebas.

Kemudian, adanya situasi krisis tersebut maka harus segera ditangani melalui proses manajemen krisis melalui strategi komunikasi yang dapat dilakukan. Berikut prinsip-prinsip dalam strategi komunikasi krisis yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali:

1. Kontak Media Massa

Pemerintah Provinsi Bali hampir memanfaatkan semua media, bahkan memiliki beberapa media secara *official* dari Pemerintah Provinsi Bali seperti

Instagram, Youtube, Facebook, Twitter dan Website. Pada media yang dimanfaatkan, Pemerintah Provinsi Bali menyampaikan banyak informasi khususnya poin penting yang menjelaskan bahwa beritaberita yang tersebar tidak benar, serta memberikan seluruh informasi yang berhubungan dengan upaya-upaya yang dilaksanakan dalam penanganan COVID-19. Secara khusus pada website resmi, Pemerintah Provinsi Bali akan mengkonfirmasi pemberitaan hoaks yang beredar. Salah satunya melalui menu “Berita” dan “Informasi Publik” pada website yang diolah oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Prov. Bali. Meskipun tidak selalu diperbarui, namun website tersebut masih aktif dari tahun ke tahun. Selain itu, Pemerintah Provinsi Bali memanfaatkan website ataupun portal berita online lainnya, salah satunya pada website [tangkalhoax.denpasarkota.go.id](http://tangkalhoax.denpasarkota.go.id).

## 2. Tim Komunikasi

Tim Komunikasi merupakan tim yang melakukan perencanaan yang terkoordinasi dalam pembagian kerja untuk menangani situasi krisis, dalam hal ini terdapat tim khusus untuk menangani hoaks, yang dapat mendeteksi hingga mengambil berita hoaks tersebut. Selain itu, terdapat tim yaitu semua organisasi Pemerintah Provinsi memainkan perannya sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Tim tersebut adalah Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Bidang Publikasi dan Dokumentasi / Humas dari Pemerintah Provinsi Bali. Tugas SATGAS tersebut adalah untuk mengumpulkan dan mengolah data

terkait penanganan COVID-19. Selain itu, ditugaskan untuk mendeteksi ketika terdapat hoaks hingga verifikasi berita hoaks yang benar atau tidak. Hingga tugas terakhir yang harus dilakukan adalah mempublikasikan kembali ke grup Whatsapp sebagai asal berita hoaks, serta mengunggah ke media-media sosial milik Pemerintah Provinsi Bali.

### 3. Fakta

Dalam menjalankan strategi komunikasi krisis diperlukan pengumpulan fakta untuk dinyatakan kepada masyarakat guna mengurangi resiko munculnya *shock*, kepanikan dan kekhawatiran masyarakat. Hal tersebut dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali melalui tim komunikasi yang telah ditugaskan melalui beberapa langkah sehingga dapat mengumpulkan dan mengolah data terkait penanganan COVID-19. Dengan mengumpulkan fakta dari hasil pencarian berita hoaks, tim Satgas khusus tersebut memiliki kewajiban untuk melakukan verifikasi dan membagikan kembali berita yang benar kepada masyarakat melalui media yang digunakan. Selain itu, Pemerintah Provinsi Bali pun memanfaatkan pemerintah formal maupun informal, termasuk Desa Adat untuk meminimalisir kekhawatiran masyarakat. Bahkan terdapat keputusan tersendiri untuk penanganan COVID-19 yang berbasis di Desa Adat Provinsi Bali yang diunggah pada situs website resmi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali.

### 4. Konferensi Pers Berkala

Perlunya dilakukan konferensi pers secara berkala guna memberikan informasi yang *upto-date* kepada masyarakat. Hal tersebut juga dilakukan untuk menghindari publisitas negatif yang ada di media, seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali yang melakukan Konferensi Pers setiap hari, bahkan adanya penyampaian data terkait hoaks saat Konferensi Pers. Selain itu, pada setiap kesempatan dan terdapat perkembangan regulasi pun dilakukan Konferensi Pers. Kemudian, hasil Konferensi Pers tersebut biasanya diunggah oleh media kerjasama sekaligus diunggah pada akun *official* dari media sosial Provinsi Bali sendiri.

#### 5. Tidak Menutup Informasi

Pemerintah Provinsi Bali memberikan informasi secara adil, baik positif maupun negatif. Tidak perlu ada yang ditutupi dalam menyampaikan informasi ke publik, namun tetap secara hati-hati sehingga tidak menyebabkan penurunan reputasi. Hal tersebut dilakukan semata-mata karena tujuan penyampaian informasi yang benar untuk masyarakat adalah edukasi sehingga ketika masyarakat menemui hoaks, dapat lebih berhati-hati. Pemerintah Provinsi Bali juga selalu transparan memberikan kebaruan pemberitaan mengenai situasi yang terjadi di Bali, apalagi mengenai pandemi COVID-19. Selain itu, Pemerintah Bali pun sangat terbuka, serta memanfaatkan berbagai jenis saluran informasi untuk menghindari adanya penyebaran hoaks, termasuk penyediaan website khusus untuk mengkonfirmasi pemberitaan hoaks yang berbeda.

#### 6. Berhati-hati dalam Menyampaikan Informasi

Pemerintah Provinsi Bali mengedepankan kehati-hatian dalam penyampaian informasi kepada masyarakat dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dan menghindari menyalahkan pihak lain, apalagi Pemerintah Provinsi Bali memanfaatkan Banjar dan desa adat yang tentunya efektif dilaksanakan di Bali. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Bali tentunya mengutamakan kepentingan masyarakat dalam situasi pandemi COVID-19, apalagi semenjak diberlakukannya kembali sekolah tatap muka, serta kehati-hatian tersebut dilakukan pula untuk menentukan langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19.

#### 7. Komunikasi Reputasi

Pemerintah Provinsi Bali melakukan upaya komunikasi *advocacy* yaitu kewajiban untuk meluruskan informasi yang salah dan menjawab kritikan. Hal tersebut dilakukan melalui pemanfaatan media sosial yang sudah rutin dilakukan dan tetap melaksanakan pendekatan kekeluargaan, misalnya melalui pengunggahan artikel berita ataupun hasil dari Konferensi Pers yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali.

#### 8. Komunikasi Empati

Pemerintah Provinsi Bali tentunya menghindari kesalahan yang menyinggung pihak lain, khususnya masyarakat. Hal tersebut dilakukan misalnya melalui pemanfaatan media lainnya, seperti media konvensional, seperti televisi, koran dan radio sehingga Pemerintah dapat menjangkau seluruh masyarakat, tanpa

terkecuali. Selain itu, dalam pengambilan kebijakan ataupun keputusan terkait penanganan COVID-19 dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Hal inilah yang akhirnya memiliki keterikatan dengan komunikasi reputasi.

#### 9. Perbanyak Saluran Komunikasi

Pemerintah Provinsi Bali melakukan langkah dengan membuka saluran komunikasi dengan seluruh pihak yang terdampak krisis, karena tugas Pemerintah adalah sebagai regulator, sehingga harus memberikan panduan dan aturan. Apalagi upaya preventif dan penegakan hukum pun sudah dilakukan. Selain itu, Pemerintah Provinsi Bali pun telah menggunakan segala sumber daya yang dimiliki, sekaligus memanfaatkan media semaksimal mungkin.

Meskipun Pemerintah Provinsi Bali menerapkan berbagai upaya sebagai strategi komunikasi krisis untuk menangani pemberitaan hoaks yang beredar, namun nyatanya masih kurangnya keaktifan dalam website resmi Provinsi Bali sendiri, sehingga dapat dilihat bahwa lebih aktif website sebagai portal berita online lainnya yang akhirnya memberikan informasi mengenai hoaks yang tersebar di Provinsi Bali.